

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih Di Kabupaten Garut

Jam Jam Nurjaman

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

Abstrak

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sejak dilaksanakannya pemilu di Indonesia khususnya di Kabuapten Garut belum pernah mencapai angka diatas 90 % bahkan hingga 100%. Kurangnya partisipasi ini disebabkan atas sikap politik dari para pemilih yang diduga kurang merespon atas kebijakan pe,ilu yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan pemilu itu sendiri. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih Di Kabupaten Garut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 pemilih di Kabupaten Garut yang tersebar di 5 daerah pemilihan dengan menggunakan tehknik cluster random sampling berdasarkan usia, pendidikan dan pekerjaan. Teknik pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan adalah sudi lapangan meliputi observasi angket dan wawancara, serta studi dokumentadi. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Dari hasil penelitian menunjukan pelaksanaan kebijakan pemilu berpengaruh cukup signifikan terhadap sikap politik pemilih dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih. Pelaksanaan kebijakan pemilu berpengaruh cukup signifikan terhadap sikap politik pemilih. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan pemilu berpengaruh cukup signifikan terhadap partisipasi politik pemilih. Serta Sikap Politik Pemilih berpengaruh cukup signifikan terhadap Partisipasi Politik Pemilih.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Pemilih, Pelaksanaan Kebijakan Pemilu, Sikap Politik Pemilih.

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan tonggak penting dalam mempresentasikan kedaulatan rakyat, serta pencerminan peran aktif masyarakat dalam politik pemerintahan. Oleh sebab itu partisipatif merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu yang mencerminkan demokrasi di suatu negara berjalan sukses.

Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Pemilu seringkali muncul. Kita lihat beberapa masalah yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan Pemilu yang kurang optimal tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hingga pelanggaran undang undang, dari masalah pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih, masalah kotak dan surat suara, sarana dan prasarana dalam kampanye, hingga keterlibatan penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah yang seharusnya bersifat independen sebagai penmbuat kebijakan serta pelaksanaan kebijakan pemilu kerap kali muncul dalam permasalahan pemilu. Bahkan sosialisasi yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan pemilu yang bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai pemilih pun kerap dirasakan kurang optimal. Padahal Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan suatu institusi yang independen dan bertanggung jawab atas terlaksananya setiap pemilihan umum agar lebih berusaha meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat, dan memberikan pengetahuan serta pemahaman atas hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang wajib berperan aktif dalam pesta demokrasi sebagai perwujudan pelaksanaan politik negara.

Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Pemilu. Hal ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang lebih menikmati informasi-informasi konflik politik, kriminalisasi politik, independensi pelaksana kebijakan yang setiap hari diberitakan oleh media cetak dan elektronik, ketimbang informasi positif yang menumbuhkan kesadaran sikap politik atas pentingnya partisipasi masyarakat. Makin tinggi masalah yang ditimbulkan oleh pelanggaran dan ketidak optimalan kinerja pelaksana kebijakan Pemilu, semakin menambah sikap pemilih ke arah negatif, yang berdampak tidak terwujudnya partisipasi masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu tersebut, merupakan perwujudan dari sikap politik masyarakat. Apabila penyelenggara Pemilu berhasil melaksanakan kebijakan tersebut, maka akan mempengaruhi sikap politik masyarakat yang nantinya akan mewujudkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu, apabila dalam pelaksanaan pemilu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang tinggi, hal ini menunjukkan proses atas pembangunan kesadaran berpolitik masyarakat berjalan dengan baik.

Di Kabupaten Garut sendiri tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum mencapai 100%. Dari data di KPU sendiri tingkat partisipasi masyarakat masih belum mencapai 100 % tingkat partisipasi pemilih. Dari data penggunaan hak pilih dalam Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT di Kabupaten Garut tercatat 1.936.772 pemilih sedangkan yang menggunakan jumlah hak pilih sebanyak 1.514.917 pemilih.

Berdasarkan pengamatan awal, serta hasil wawancara terhadap beberapa penyelenggara Pemilu, peneliti menduga pelaksanaan kebijakan Pemilu di Kabupaten Garut belum optimal dilaksanakan. hal ini diindikasikan dengan kurangnya sosialisasi kebijakan pemilu terhadap masyarakat, masalah independensi penyelenggara pemilu berserta aparat pemerintah, serta logistik yang kerap menjadi sorotan karena dianggap tidak sesuai dengan juklak dan juknis pemilu, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi atas sikap politik pemilih yang langsung tidak langsung dapat berakibat terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih di Kabupaten Garut”**.

2. Metodologi

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi Metode penelitian eksplanasi adalah suatu metode penelitian untuk mencari penjelasan dan keterangan dalam rangka menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara dua variabel serta pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian hubungan sebab akibat (*causal effectual*). Metode eksplanasi ini dengan teknik evaluasi, yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menguji dampak serta hasil dari suatu kebijakan, kegiatan dan tindakan terhadap obyek sasaran serta lingkungannya.

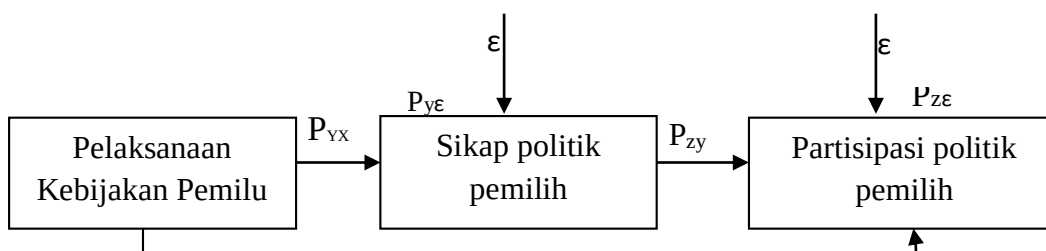
Sedangkan untuk mempermudah penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari responden sesuai dengan asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan teori-teori dari variabel penelitian, maka peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah :

3. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum di Kabupaten Garut dilaksanakan dalam beberapa tahapan yakni tahap pencalonan, tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta tahap pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Garut tersebut, terkait dengan permasalahan pemilu di Kabupaten Garut, terdapat beberapa masalah yang terjadi diantaranya masalah pemutakhiran data, masalah pengrekrutan petugas pelaksana kebijakan, kekurangan finansial, minimnya sosialisasi, sikap pemilih yang negatif, hingga transformasi infomesai yang kurang. Hal ini sudah barangtentu mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang disebabkan sikap politik yang negatif akibat dari permasalahan kebijakan yang kurang optimal.

3.1 Hasil penelitian

Berdasarkan kondisi tersebut dalam penelitian ini, peneliti menguji fakta dan data tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemilu, Sikap Politik Pemilih, Partisipasi Politik Pemilih, dengan model penelitian yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Dari hasil penelitian dengan menggunakan model penelitian tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

Hipotesis utama	Koefisien Jalur	T _{hitung}	T _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) Terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) dalam mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih (Z)	0,5602	14,63	1,40	0,3138	Cukup Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) terhadap Sikap Politik Pemilih (Y)	0,4611	5,14	1,99	0,2126	Cukup Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z)	0,4299	4,51	1,99	0,2269	Cukup Signifikan

Hipotesis utama	Koefisien Jalur	T _{hitung}	T _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh secara signifikan terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z)	0,2119	2,29	1,99	0,0869	Cukup Signifikan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengujian Hipotesis Utama: Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih

Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($F_{0,975; 98}$) yaitu $F_{hitung} = 14,63 > F_{tabel} = 1,40$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 , sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar = 0,3138. Nilai ini menunjukkan bahwa *Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) berpengaruh terhadap Sikap Politik Pemilih (Y) dalam mewujudkan Partisipasi Politik Pemilih (Z)* sebesar 31,38 %,

Sedangkan sisanya ($P_{YZ\epsilon}$)² sebesar 68,62 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Variabel Sikap Politik Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Besarnya pengaruh tersebut sesuai dengan hasil penelitian atas tanggapan responden terhadap dimensi-dimensi dalam variabel atas pengaruh pelaksanaan kebijakan Pemilu terhadap sikap politik dalam mewujudkan partisipasi politik yang menunjukkan adanya kurang tepatnya sasaran kebijakan lebih terhadap kelompok Pemilih sebesar 64 %, Masih adanya kekurangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Pemilu yang mencapai sebesar 66 %, Perilaku dan etika masyarakat yang homogen yang mencapai sebesar 66,8 % pada dimensi karakteristik masalah. Serta masih adanya kurang seriusan pejabat dalam memegang komitmen yang mencapai angka sebesar 62,6 %, kesesuaian konsep dengan masalah masyarakat sebesar 64% dan kesesuaian konsep dengan aturan” sebesar 66,4%

Sedangkan pada dimensi karakteristik kebijakan yang menjadi penyebab adanya pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu atas sikap politik pemilih dalam mewujudkan partisipasi politik pemilih yaitu kurangnya dukungan publik dari pemilih, kurang tersediaan atas finansial yang cukup sebesar 67,2% serta kurang adanya kesungguhan yang jelas pejabat yang mencapai angka 67,6%.

Selain itu pada dimensi lingkungan kebijakan yang menjadi penyebab adanya pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap sikap politik pemilih dalam mewujudkan partisipasi politik pemilih yaitu kurang adanya respon masyarakat terhadap kebijakan sebesar 63,6 %, komitmen SDM penyelenggara sebesar 65%, dan kondisi situasi lingkungan yang memudahkan untuk melaksanakan kebijakan” sebesar 66%.

Sudah barang tentu hal tersebut mempunyai akibat atas sikap politik pemilih. Hal ini dilihat dari indikator pada dimensi kognisi yaitu kurang kemampuan Seseorang dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dia dapat” sebesar 57,82 %, Penyelenggara yang kurang mampu

menjelaskan Data” dengan persentase 63,6 %, penyelenggara kurang mampu menjelaskan struktur/pola yang mencapai 65%, para penyelenggara pemilu dan masyarakat kurang dapat menerapkan aturan” sebesar 67,8% serta berakibat pada Seseorang yang kurang mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %.

Selain itu pada dimensi Afeksi terlihat pada indikator kurang adanya ada ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang mencapai 66,8 %. Serta pada dimensi psikomotorik terdapat kurang adanya respon masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.

Disamping itu mengakibatkan pula pada partisipatif masyarakat yang berkurang. Hal ini dilihat dari dimensi proses partisipatif yang diindikasikan oleh kurangnya masyarakat dalam ikut serta melakukan penghitungan suara dalam pemilu yang mencapai 67,8 %, dan kekurang ikut sertaan masyarakat dalam diskusi politik untuk menambah wawasan yang mencapai 66,2%. Serta dalam bentuk partisipasi yang dilihat dari indikator kurang aktif masyarakat dalam berperan aktif ikut melakukan penataan tempat pemilihan umum yang mencapai 65 %, Masyarakat kurang memberikan idenya dan gagasan dalam setiap diskusi sebesar 67 %, serta berakibat pada masyarakat yang kurang ikut serta dalam menjaga keamanan di TPS yang mencapai 66%

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa faktor karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan Karakteristik Lingkungan Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemilu menentukan terhadap sikap politik pemilih yang pada gilirannya berpengaruh terhadap Partisipasi Politik Pemilih. Partisipasi Politik Pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan kebijakan pemilu dan sikap politik pemilih semata, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain (*epsilon*) yang tidak diteliti, bahkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain tersebut cukup besar yakni mencapai 68,62 %. Besarnya faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih disebabkan karena diduga jumlahnya banyak. Faktor-faktor lain tersebut antara lain faktor pendidikan politik, manajemen penyelenggaraan pemilu, sarana dan prasarana, dll Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan menentukan terhadap Partisipasi Politik Pemilih secara keseluruhan.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis : Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Sikap Politik Pemilih

Sementara itu mengenai besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap sikap politik pemilih diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 98}$) yaitu $t_{hitung} = 5,14 > t_{tabel} = 1,99$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 , sehingga variabel *Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X)* berpengaruh secara signifikan terhadap *Sikap Politik Pemilih (Y)*.

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YX}) sebesar = 0,2126. Nilai ini menunjukkan bahwa *Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berpengaruh terhadap Sikap Politik Pemilih* sebesar 21,26 %. Sedangkan sisanya ($P_{Y\epsilon}$)² sebesar 78,72 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Besarnya pengaruh tersebut sesuai dengan hasil penelitian atas tanggapan responden terhadap dimensi-dimensi dalam variabel atas pengaruh pelaksanaan kebijakan Pemilu terhadap sikap politik yang menunjukan adanya kurang tepatnya sasaran kebijakan lebih terhadap kelompok Pemilih sebesar 64 %, Masih adanya kekurangan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan Pemilu yang mencapai sebesar 66 %, Perilaku dan etika masyarakat yang homogen yang mencapai sebesar 66,8 % pada dimensi karakteristik masalah. Serta masih adanya kurang seriusan pejabat dalam memegang komitmen yang mencapai angka sebesar 62,6 %, kesesuaian konsep dengan masalah masyarakat sebesar 64 % dan kesesuaian konsep dengan aturan sebesar 66,4 %.

Disamping itu disebabkan oleh kurang tersedianya finansial yang cukup sebesar 67,8 %, kurang adanya kesungguhan yang jelas pejabat yang mencapai angka 67,6 %, dan kurang adanya respon masyarakat terhadap kebijakan sebesar 63,6 %, komitmen SDM penyelenggara sebesar 35%, dan kondisi situasi lingkungan yang memudahkan untuk melaksanakan kebijakan sebesar 66 %.

Dari hal tersebut diatas mengakibatkan kurang mampu Seseorang dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dia dapat sebesar 56,8 %, Penyelenggara yang kurang mampu menjelaskan data dengan persentase 63,6 %, penyelenggara kurang mampu menjelaskan struktur/pola yang mencapai 65 %, para penyelenggara pemilu dan masyarakat kurang dapat menerapkan aturan sebesar 67,8 % serta berakibat pada Seseorang yang kurang mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %, kurang adanya ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang mencapai 66,8 %. Serta kurang adanya respon masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berpengaruh positif terhadap Sikap Politik Pemilih, artinya semakin optimal Pelaksanaan Kebijakan Pemilu maka semakin baik pula sikap politik pemilih. Sebaliknya bila pelaksanaan kebijakan kurang optimal maka sikap politik pemilih akan kurang baik. Aspek-aspek yang pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh terhadap sikap politik pemilih meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan karakteristik lingkungan kebijakan. Sedangkan aspek-aspek sikap politik pemilih yang dipengaruhi pelaksanaan kebijakan pemilu adalah aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik.

3.2.3 Pengujian Sub Hipotesis: Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Pemilih

Sedangkan mengenai besarnya pengaruh Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Pemilih diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 98}$) yaitu $t_{hitung} = 4,51 > t_{tabel} = 1,99$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 , sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Partisipasi Politik Pemilih (Z).

Pengaruh variabel X terhadap variabel Z terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yakni pengaruh X terhadap Z melalui Y. Besarnya pengaruh langsung X terhadap Y diperoleh dengan rumus:

$$r_{zx} \cdot r_{zx} = 0,4299 \times 0,4299 = 0,1848$$

Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) berpengaruh secara langsung terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) sebesar 18,48 %. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung diperoleh dengan rumus:

$$(P_{ZY})(r_{YZ})(P_{ZX}) = 0,2119 \times 0,4102 \times 0,4299 = 0,0420$$

Nilai ini menunjukkan pengaruh tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) sebesar 4,2%. Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung Variabel X terhadap Z diperoleh dengan rumus:

$$(r_{zx})^2 + (P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,1848 + 0,0420 = 0,2269$$

Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah pengaruh langsung dan tidak variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (X) terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) adalah sebesar 22,69 %. Sedangkan sisanya $(P_{y\epsilon})^2$ sebesar 77,31 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Besarnya pengaruh tersebut sesuai dengan hasil penelitian atas tanggapan responden terhadap dimensi-dimensi dalam variabel atas pengaruh pelaksanaan kebijakan Pemilu terhadap partisipasi politik yang menunjukkan kurang kemampuan Seseorang dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dia dapat sebesar 56,8 %, Penyelenggara yang kurang mampu menjelaskan data dengan persentase 63,6 %, penyelenggara kurang mampu menjelaskan struktur/pola yang mencapai 65 %, para penyelenggara pemilu dan masyarakat kurang dapat menerapkan aturan sebesar 67,8 % serta berakibat pada Seseorang yang kurang mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %, kurang adanya ada ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang mencapai 66,8 %. Serta kurang adanya respon masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.

Penyebab tersebut mengakibatkan adanya sikap politik pemilih yang negatif dengan diindikasikan pada kurangnya masyarakat dalam ikut serta melakukan penghitungan suara dalam pemilu yang mencapai 67,8 %, dan kurang ikut serta masyarakat dalam diskusi politik untuk menambah wawasan yang mencapai 65,2 %. Serta dalam bentuk partisipasi yang dilihat dari indikator kurang aktif masyarakat dalam berperan aktif ikut melakukan penataan tempat pemilihan umum yang mencapai 65 %, Masyarakat kurang memberikan idenya dan gagasan dalam setiap diskusi sebesar 67 %, serta berakibat pada masyarakat yang kurang ikut serta dalam menjaga keamanan di TPS yang mencapai 66%.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berkontribusi secara langsung terhadap meningkatnya Partisipasi Politik Pemilih. Selain itu juga Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berkontribusi secara tidak langsung terhadap Partisipasi Politik Pemilih melalui Sikap Politik Pemilih.

3.2.4 Pengujian Sub Hipotesis: Pengaruh Sikap Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih

Sedangkan mengenai besarnya pengaruh Pengaruh Sikap Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,99. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975; 98}$) yaitu $t_{\text{hitung}} = 2,29 > t_{\text{tabel}} = 1,99$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 , sehingga variabel Sikap Politik Pemilih (Y) berpengaruh cukup signifikan terhadap variabel Partisipasi Politik Pemilih(Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{zy}) sebesar = 0,0869. Nilai ini menunjukkan bahwa Sikap Politik Pemilih (Y) berpengaruh terhadap Partisipasi Politik Pemilih (Z) sebesar 8,69%, Sedangkan sisanya $(P_{z\epsilon})^2$ sebesar 91,31%

partisipasi politik pemilih dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar variabel-variabel Sikap Politik Pemilih yang diteliti dalam penelitian ini.

Besarnya pengaruh variabel Y ke X yang menunjukkan angka 8,69 ini, menunjukkan adanya inikonsistensi pemilih dalam sikapnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian atas tanggapan responden terhadap dimensi-dimensi dalam variabel sikap politik pemilih untuk mewujudkan partisipasi politik yang menunjukkan kurang kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dia dapat” sebesar 56,8 %, Penyelenggara yang kurang mampu menjelaskan data dengan persentase 63,6 %, penyelenggara kurang mampu menjelaskan struktur/pola yang mencapai 65%, para penyelenggara pemilu dan masyarakat kurang dapat menerapkan aturan” sebesar 67,8% serta berakibat pada Seseorang yang kurang mampu melakukan pengujian terhadap yang akan dia pilih yang mencapai sebesar 66,6 %, kurang adanya ada ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang mencapai 66,8 %. Serta pada dimensi psikomotorik terdapat kurang adanya respon masyarakat karena kebijakan pemilu kurang dimengerti oleh masyarakat serta setiap orang kurang mengikuti proses dalam pemilu yang mencapai angka 63,2 %.

Hal-hal tersebut merupakan indikator-indikator yang menjadi pengaruh sikap politik pemilih pada partisipasi politik pemilih yang mengakibatkan kurangnya partisipasi politik pemilih dengan indikasi kurangnya masyarakat dalam ikut serta melakukan penghitungan suara dalam pemilu yang mencapai 67,8 %, dan kurang ikut sertaan masyarakat dalam diskusi politik untuk menambah wawasan yang mencapai 65,2 %. Serta dalam bentuk partisipasi yang dilihat dari indikator kurang aktif masyarakat dalam berperan aktif ikut melakukan penataan tempat pemilihan umum yang mencapai 65 %, Masyarakat kurang memberikan idenya dan gagasan dalam setiap diskusi sebesar 67 %, serta berakibat pada masyarakat yang kurang ikut serta dalam menjaga keamanan di TPS yang mencapai 66 %.

Meskipun persentase pengaruh sikap politik pemilih terhadap politik pemilih hanya 8,69%, namun dari hasil pengujian di atas, menunjukkan bahwa Sikap Politik Pemilih berpengaruh positif atau masih ada pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih berpengaruh positif terhadap Partisipasi Politik Pemilih, artinya semakin positif sikap politik pemilih maka partisipasi politik pemilih semakin meningkat. Partisipasi politik pemilih yang dipengaruhi oleh sikap politik pemilih meliputi proses serta bentuk partisipasi. Sedangkan sikap politik pemilih meliputi kognisi, afeksi dan psikomotorik.

Selain sikap politik pemilih, Partisipasi Politik Pemilih juga dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti (*epsilon*). Faktor luar tersebut ternyata pengaruhnya sangat besar yaitu mencapai 91,31%. Hal ini sangat wajar sebab sikap politik hanya merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih, yang justru terdapat banyak faktor lainnya yang diduga berpengaruh (*epsilon*) antara lain pelaksanaan kebijakan pemilu, manajemen penyelenggara pemilu, pendidikan politik, rekrutmen politik, manajemen partai, sarana dan prasarana pemilu, ideologi, sikap apatisme pemilih dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan masing-masing faktor saling berkaitan dan akan menentukan tingkat Partisipasi Politik Pemilih.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, penelitian, pengolahan data, analisis dan pembahasan maka dapat ditarik disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan pemilu berpengaruh secara positif yang cukup signifikan terhadap sikap politik pemilih. Hal ini menunjukkan sikap politik pemilih tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan dalam pelaksanaannya. Sebuah kebijakan pemilu merupakan solusi dari permasalahan pemilu yang ada di masyarakat, sudah barang tentu penerimaan informasi dan pengetahuan serta pemahaman mengenai kebijakan itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Disamping itu upaya untuk menjaga konsistensi, independensi dan netralitas dari penyelenggara pemilu sangat diharapkan, karena hal ini merupakan akan menimbulkan sikap positif pemilih yang akan mendorong terwujudnya partisipasi dalam penyelenggara pemilu.
- b. Sikap politik pemilih berpengaruh secara positif yang cukup signifikan terhadap Partisipasi Politik Pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif pemilih tidak terlepas dari aspek-aspek yang ada dalam sikap politik diantaranya aspek kognitif, afeksi dan psikomotorik, apabila sikapnya negatif maka akan terjadi penurunan partisipatif dan apabila sikapnya positif maka akan terjadi peningkatan partisipatif. Dari hasil penelitian ini bentuk proses dan bentuk partisipasi dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan aspek psikomotorik pemilih.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Pemilu berpengaruh secara positif yang cukup signifikan terhadap Partisipasi Politik Pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu memiliki pengaruh dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap tingkat partisipasi politik pemilih. Sikap pemilih yang inkonsistensi ditimbulkan kurangnya pengetahuan atas pemilu karena kurang sosialisasi, kurangnya komunikasi karena sasaran kebijakan kurang diperhatikan, dan kurangnya tingkat kepercayaan pemilih terhadap pelaksanaan pemilu karena lemahnya penerapan aturan oleh pelaksana kebijakan.

Daftar Pustaka

I. Buku-Buku Teks

- Agus Dwiyanto, 2017, *Administrasi Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University press
- Alex Sobur, 2016, *Psikologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia
- Azwar Saifuddin, 2011, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Congge Umar, 2017, *Patologi Administrasi Negara*, Makassar, Sah Media
- Fayakhun Andrian, 2017, *Partisipasi Politik Virtual*, Jakarta, RM Book.
- Feist. Jess 2018, (diterjemahkan oleh Hadwitia Dewi Pertiwi), *Teori Kepribadian*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Gugun Heryanto, 2019, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta, IRCiSoD
- Hadi, Sutrisno, 2015, *Statistik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda Ni'mal dan Imam Nasef, 2017, *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, keccana
- Ismoyo Tejo, 2018, *Metroseksual*, Lampung, Deepublish
- Iskandar Jusman, 2019, *Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*, Bandung, Puspaga
- Iskandar Jusman, 2017, *Manajemen Publik*, Bandung, Puspaga.
- Iskandar Jusman, 2016, *Membangun Kekuatan Masyarakat*, Bandung, Puspaga.
- Kurniawan, Benny, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jelajah Nusa, Tanggarang.

- Mujani Saiful, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.
- Muzani saeful, 2007, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta, Gramedia Utama
- Nugrogo. Riant, 2016, *kebijakan Publik di Indonesai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahman, M., 2016, *Ilmu Administrasi*, Makasar, CV Sah Media
- Rumah Pintar Pemilu, 2016, *Memebangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, KPU RI.
- Saeful Mujani, William Liddle. Kuskridho Abardi, 2019, *Kaum Dekorot Kritis: Analisis Prilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokrasi*, Jakarta, Gramedia
- Subag Hukum KPU Garut, 2018, *Berdiri Menegakan Konstitusi*, Garut KPU
- Thoha Miftah, 2017, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Depok, kecncana

II. Jurnal Dan Penelitian Ilmiah

- Daud M. Liand, 2016, *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)
- Novi, 2017, *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kader Partai Politik Terhadap Manajemen Partai Politik Untuk Mewujudkan Partisipasi Kader Partai Politik (studi kasus di DPC PKB Kabupaten Garut)*, Program Studi Magister Administrasi Negera, Universitas Garut
- Parhan, 2017, *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Manajemen Pemilu Terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu Untuk Mewujudkan Kualitas Pemilu*,), Program Studi Magister Administrasi Negera, Universitas Garut
- Setiajid, 2011, *Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang)* Integralistik. No.1/Th.XXII/2011. Januari-Juni.

III. Dokumen-Dokumen

- Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018, tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan Anggota KPU Kabupaten
- Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Salinan Rapat Pleno KPU, 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten.